



ENERGI BARU
**ANAMBAS
MAJU**



RENSTRA BAPPEDA 2025-2029



Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perkantoran Daerah, Lt. 3, Tarempa Timur, Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 29791.

 +62-812-7730-7410

 bappeda@anambaskab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik internal Bappeda Kab. Kep. Anambas maupun pihak-pihak terkait lainnya, sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat.

Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara holistik, inklusif, dan berdaya saing. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini sebelum nantinya menjadi dokumen final. Akhir kata, semoga Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tarempa, 22 September 2025

KEPALA BAPPEDA,



ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 198207012010011019



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Aparatur.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	27
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis.....	28
2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29
2.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
2.8. Telaahan Renstra K/L.....	32
2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
2.10. Penentuan Isu-isu Strategis.....	39
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	40
3.1. Tujuan dan Sasaran	40
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	44
Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	46
4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	46
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	68
Bab V Penutup	71



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	13
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	15
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	17
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung	20
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas	23
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	27
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	42
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda ...	48
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.....	74
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda.....	75
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas	8
--	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memberikan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, terukur, serta berorientasi pada hasil.

Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti evaluasi capaian pembangunan pada periode sebelumnya, perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Selain itu, dokumen ini juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan relevansi dan keberlanjutan rencana pembangunan.

Renstra Bappeda ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Melalui dokumen ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara program dan kegiatan



pembangunan di setiap sektor sehingga dapat mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan Bappeda Kab. Kep. Anambas dapat semakin memperkuat perannya sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional TAHUN 2025—2029;
 11. Rencana Implementatif BRIN Tahun 2025 - 2029;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683).
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis yang mendasari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja Bappeda Kab. Kep. Anambas selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, adalah untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah guna menciptakan arah pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
2. Memberikan panduan operasional bagi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi



- Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
 4. Mengidentifikasi prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dalam periode 2025-2029;
 5. Mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien dengan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah;
 6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui kerangka kerja yang jelas untuk pengendalian dan evaluasi kinerja program; dan
 7. Mengantisipasi dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan transformasi digital.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra .

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode



sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan. Permasalahan dan Isu Strategis berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Bappeda Kab. Kep. Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas. strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

**BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

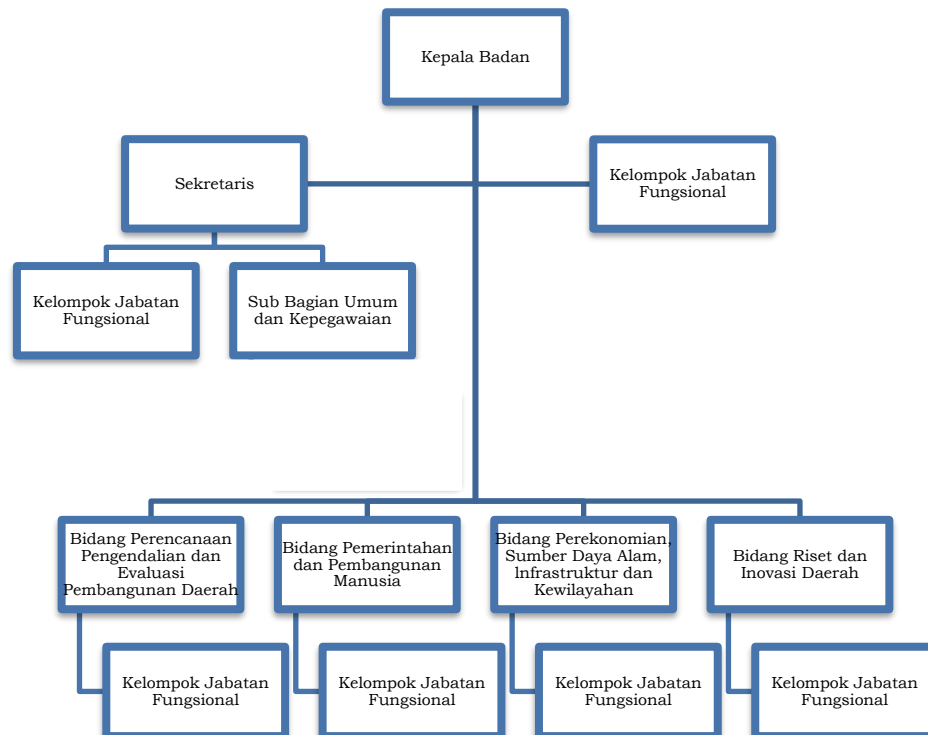


BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Kab. Kep. Anambas dibentuk melalui Peraturan Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bappeda Kab. Kep. Anambas dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda. Dalam pelaksanaannya Bappeda Kab. Kep. Anambas memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda
Kabupaten Kepulauan Anambas





Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Bappeda;
- b. koordinasi kegiatan Bappeda;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Bappeda;
 - b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Bappeda;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan surat masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;



- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bappeda;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Bappeda;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Jangka Pendek Daerah, mengoordinasikan, monitoring/ pengendalian, analisis, evaluasi/penilaian serta menyusun pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam,



- infrastruktur dan kewilayahan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.



2.2 Sumber Daya Aparatur

Bappeda Kab. Kep. Anambas didukung oleh 53 orang yang terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 35 orang pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki keterampilan yang memadai yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) sebagai pendukung organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

a. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Adapun komposisi aparatur Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Ruang	Jumlah (Orang)
Pembina Tk. I	IV/b	1
Pembina	IV/a	2
Penata Tk. I	III/d	5
Penata	III/c	3
Penata Muda Tk. I	III/b	2
Penata Muda	III/a	5
PPPK	IX	15
PPPK	V	20
Jumlah		53 Orang

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 53 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan variasi golongan serta ruang yang berbeda. Pada jenjang PNS, terdapat 1 orang dengan golongan Pembina Tingkat I (IV/b) dan 2 orang pada golongan Pembina (IV/a). Selanjutnya, pada golongan Penata Tingkat I (III/d) terdapat 5 orang, Penata (III/c) sebanyak 3 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 2 orang, serta Penata Muda (III/a) sejumlah 5 orang.



Sementara itu, pada kategori PPPK terdapat jumlah yang relatif dominan, yakni 15 orang pada jenjang IX dan 20 orang pada jenjang V, sehingga total pegawai PPPK mencapai 35 orang, atau lebih dari separuh dari keseluruhan pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, PPPK memang lebih mendominasi. Namun demikian, secara kualitatif peran PNS tetap menjadi penopang utama kinerja organisasi. Hal ini tidak terlepas dari kompetensi, pengalaman, serta jenjang karier struktural yang dimiliki PNS, yang umumnya lebih matang dalam memahami dinamika perencanaan pembangunan daerah.

Dari perspektif kelembagaan, pekerjaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat membutuhkan kehadiran dan peran PNS sebagai motor penggerak organisasi. Dengan jumlah 18 orang, keberadaan PNS masih jauh dari kondisi ideal. Ketimpangan antara kuantitas PPPK dan kualitas PNS ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menata kembali komposisi pegawai, baik melalui peningkatan kapasitas PPPK maupun penambahan formasi PNS yang sesuai dengan kebutuhan strategis lembaga.

Secara akademis, kondisi ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ketidakseimbangan antara input resources (jumlah pegawai) dengan organizational capability (kemampuan kelembagaan). Artinya, meskipun kuantitas pegawai telah mencukupi, kualitas yang dibutuhkan untuk menopang fungsi strategis perencanaan pembangunan masih bergantung pada keberadaan PNS. Oleh karena itu, keberlanjutan kinerja organisasi menuntut adanya strategi penguatan sumber daya manusia yang berorientasi pada keseimbangan jumlah dan kualitas pegawai, agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.



b. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Adapun komposisi pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber Daya Aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
1	P N S: 18 Orang	S2	: 7 Orang
		S1/D4	: 10 Orang
		D2	: 1 Orang
2	PPPK: 35 Orang	S1/D4	: 15 Orang
		SMA/SMK	: 20 Orang
Jumlah Personil		53 Orang	

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 53 orang, yang terbagi atas 18 orang PNS dan 35 orang PPPK. Dari sisi PNS, mayoritas telah menempuh pendidikan tinggi, dengan rincian 5 orang bergelar S2, 10 orang berpendidikan S1/D4, dan hanya 1 orang yang berpendidikan D2. Sementara itu, pada kelompok PPPK, terdapat 15 orang dengan latar belakang pendidikan S1/D4 dan 20 orang berpendidikan SMA/SMK.

Jika ditinjau dari aspek kuantitatif, PPPK jelas mendominasi jumlah personil, yakni sekitar 60% dari total aparatur. Namun demikian, secara kualitatif, PNS menunjukkan posisi yang lebih dominan. Hal ini tercermin dari tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, di mana sebagian besar telah menamatkan jenjang sarjana bahkan pascasarjana, yang sangat relevan dengan tuntutan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kualitas sumber daya PNS memberikan kontribusi strategis dalam menopang fungsi utama



kelembagaan.

Kondisi ini semakin menegaskan bahwa meskipun secara kuantitas PPPK cukup signifikan, pekerjaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada hakikatnya sangat membutuhkan keberadaan PNS sebagai penopang utama. Jumlah PNS yang hanya 18 orang masih jauh dari kondisi ideal untuk menghadapi kompleksitas perencanaan pembangunan yang membutuhkan kemampuan analisis, koordinasi lintas sektor, serta kepemimpinan birokrasi.

Dari perspektif akademis, ketimpangan ini dapat dipandang sebagai fenomena *mismatch* antara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi publik. Keberlimpahan tenaga kerja secara jumlah (kuantitatif) belum tentu berbanding lurus dengan kapasitas organisasi untuk menghasilkan kebijakan dan perencanaan yang berkualitas (kualitatif). Oleh sebab itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi PPPK serta pemenuhan formasi PNS yang memadai, sehingga terdapat keseimbangan antara jumlah dan kualitas aparatur. Hal ini penting agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menjalankan fungsinya secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada Bappeda Kab. Kep. Anambas didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari PNS dan PPPK. Untuk detailnya, sumber daya aparatur berdasar kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
PNS	12	6
PPPK	17	18
Jumlah	29	24

Berdasarkan tabel komposisi Sumber Daya Aparatur menurut jenis kelamin di Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah aparatur secara keseluruhan tercatat sebanyak 53 orang, yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Komposisi ini menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang, dengan proporsi laki-laki sekitar 55 persen dan perempuan sekitar 45 persen.

Pada kelompok PNS, jumlah aparatur laki-laki sebanyak 12 orang, sedangkan aparatur perempuan berjumlah 6 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa PNS laki-laki masih mendominasi struktur aparatur permanen, yang pada umumnya menempati peran strategis dalam pengendalian, koordinasi, dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, pada kelompok PPPK, jumlah aparatur perempuan (18 orang) sedikit lebih banyak dibandingkan aparatur laki-laki (17 orang). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif di lingkungan Bappeda, serta menunjukkan keterbukaan kelembagaan terhadap kesetaraan gender dalam pengisian formasi PPPK.

Secara keseluruhan, komposisi gender aparatur Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan keseimbangan yang cukup baik antara laki-laki dan perempuan. Struktur ini menjadi modal penting bagi



organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan beragam, sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan responsif terhadap perspektif gender.

Analisis Kondisi SDM Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meskipun jumlah PNS relatif terbatas, PNS berperan sebagai penggerak organisasi (organizational driver) yang menentukan arah kebijakan, kualitas substansi dokumen perencanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, dominasi PPPK secara kuantitatif belum sepenuhnya diimbangi dengan kesesuaian kompetensi terhadap syarat jabatan perencanaan, sehingga kontribusinya masih lebih kuat pada aspek administratif dan teknis pendukung.

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan fungsional, di mana beban analitis dan strategis terkonsentrasi pada PNS. Oleh karena itu, diperlukan penataan peran, peningkatan kompetensi, dan penguatan sistem pembelajaran organisasi agar kapasitas perencanaan dapat terdistribusi secara lebih merata dan berkelanjutan.

Secara umum, kondisi Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan organisasi perencana daerah yang bertumpu pada kualitas aparatur inti (PNS) dengan dukungan kuantitatif dari PPPK. Tantangan utama ke depan adalah meningkatkan kesesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan jabatan perencanaan, memperkuat kapasitas akademis dan teknokratis aparatur, serta membangun sistem manajemen pengetahuan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, Bappeda diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.



Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ketersediaan sarana dan prasarana kerja menjadi faktor yang sangat penting. Inventaris barang milik daerah tidak hanya berfungsi sebagai penunjang operasional sehari-hari, tetapi juga sebagai aset strategis yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang akurat dan terperinci mengenai jenis, jumlah, serta kondisi barang yang dimiliki. Data inventaris ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas sarana yang tersedia, mulai dari peralatan transportasi, perabot kantor, hingga perangkat teknologi informasi. Dengan kondisi barang yang sebagian besar tercatat dalam keadaan baik, inventaris ini mencerminkan kesiapan lembaga dalam menunjang aktivitas perencanaan pembangunan.

Berikut disajikan data inventaris barang milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Sepeda Motor	14	Baik
2	AC	18	Baik
3	Lemari/ Rak/ Buffet/ Filling Cabinet	23	Baik
4	Brankas	1	Baik
5	Meja	78	Baik
6	Kursi	176	Baik
7	Pesawat telepon/ Faks	2	Baik
8	Mesin Tik	4	Baik
9	Komputer	2	Baik
10	Note Book/ Laptop	18	Baik
11	Printer	37	Baik
12	Projector	2	Baik
13	Layar	3	Baik
14	Camera Digital/ Camera Video	14	Baik
	Jumlah	392	



Berdasarkan data inventaris, jumlah keseluruhan barang milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 392 unit dengan kondisi seluruhnya tercatat baik. Inventaris tersebut mencakup sarana transportasi, peralatan elektronik, perabot kantor, hingga perangkat teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas.

Dari sisi sarana transportasi, terdapat 14 unit sepeda motor yang berfungsi mendukung mobilitas pegawai. Pada kategori peralatan elektronik, tersedia 18 unit AC, 2 unit pesawat telepon/faks, 4 unit mesin tik, 2 unit komputer, serta 18 unit laptop/notebook. Untuk kebutuhan administrasi dan pengolahan dokumen, terdapat 37 unit printer dan 2 unit proyektor lengkap dengan 3 unit layar. Selain itu, terdapat pula 14 unit kamera digital/video sebagai penunjang dokumentasi kegiatan.

Sementara itu, pada kategori perabot kantor, jumlahnya relatif besar untuk menunjang operasional sehari-hari, yakni 23 unit lemari/rak/buffet/filling cabinet, 78 unit meja, dan 176 unit kursi. Tercatat juga 1 unit brankas sebagai sarana penyimpanan dokumen penting.

Secara umum, inventaris ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar sarana dan prasarana kantor telah tersedia dengan kondisi yang layak pakai. Namun, jika ditinjau dari jumlah, terdapat beberapa peralatan yang masih terbatas, seperti komputer (2 unit) dan proyektor (2 unit), padahal kebutuhan perencanaan dan koordinasi kerap membutuhkan perangkat teknologi informasi yang lebih memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitatif inventaris sudah cukup besar, dari aspek distribusi peralatan masih terdapat potensi ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dengan kebutuhan aktual di lapangan.

2.3 Kinerja Pelayanan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas, kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Kep. Anambas seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Disamping itu capaian kinerja lainnya yang merupakan pendukung perencanaan antara lain: Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas

Berdasarkan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Pembangunan																		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				Ada			Ada						Ada				100
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA				Ada				Ada		Ada							100
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD				100	100	100	100	100	100	98,63	99,21	98,62	98,12	98,63	99,21	98,62	98,12
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD				100	100	100	100	100	100	91,22	92,18	90,47	91,62	91,22	92,18	90,47	91,62
Penelitian dan Pengembangan																		
	Persentase implementasi rencana kelabangan				80	80	80	80	80	80	22,42	18,24	21,45	22,62	28,03	22,80	26,81	28,28



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				80	82	85	87	89	91	32,14	31,43	32,08	33,12	40,18	38,33	37,74	38,07
Penerapan SIDA :																	
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				16.13	29.03	45.16	58.06	67.74	77.42	14,2	23,08	42,6	28,43	88,03	79,50	94,33	48,97
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah				12.50	29,17	50,00	75,00	83,33	100	9,67	23,42	45,56	42,6	77,36	80,29	91,12	56,80



Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada aspek perencanaan pembangunan, tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dokumen RPJPD dan RPJMD telah tersedia sesuai jadwal yang ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA), sedangkan dokumen RKPD telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (PERKADA) dengan capaian 100% setiap tahunnya. Konsistensi program RPJMD ke RKPD telah mencapai rata-rata 98%–99%, menunjukkan tingkat keterpaduan perencanaan yang sangat baik. Sementara itu, konsistensi RKPD ke APBD masih berada pada kisaran 90%–92%, yang mengindikasikan adanya gap antara perencanaan tahunan dengan penganggaran daerah.

Pada aspek penelitian dan pengembangan, implementasi rencana kelitbangan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Dengan target tahunan sebesar 80%, realisasi yang dicapai masih berkisar antara 18% hingga 28%, menunjukkan perlunya penguatan dalam pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan. Pemanfaatan hasil kelitbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian antara 31% hingga 40%.

Dalam hal penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah menunjukkan fluktuasi dalam capaian kinerja. Pada tahun 2023, capaian hampir mendekati target, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 28,43% dari target 58,06%. Demikian pula, kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan.



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Secara keseluruhan, pelaksanaan perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan pencapaian yang tinggi dalam penyediaan dokumen perencanaan dan konsistensi perencanaan tahunan. Namun, masih terdapat tantangan dalam peningkatan konsistensi penganggaran serta optimalisasi penelitian dan pengembangan, termasuk dalam implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan serta penerapan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta mendorong inovasi berbasis riset yang lebih aplikatif di tingkat daerah. Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda, yaitu:



Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bappeda Kab. Kep. Anambas

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.818.144.980	8.742.383.373	10.239.949.576	11.093.922.926	8.279.454.296	8.691.980.680	9.037.138.648	8.541.028.322	93,89	99,42	88,25	76,99	0,08	0,04
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.118.815.100	455.852.880	1.491.644.250	2.575.609.970	802.841.884	452.735.885	1.036.239.500	949.748.532	71,76	99,32	69,47	36,87	1,95	3,59
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	589.987.000	502.453.027	422.684.900	1.003.427.907	302.281.700	498.989.121	217.585.686	513.777.952	51,24	99,31	51,48	51,20	0,36	0,21
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	342.964.000	11.286.600	666.703.220	235.707.944	290.829.750	11.238.450	232.782.149	73.350.069	84,80	99,57	34,92	31,12	18,82	4,55



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Hal ini juga disinkronkan antara peluang dan tantangan yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas.

a. Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang berupa ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai berikut:

- 1) Cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa implikasi pada fleksibilitas perencanaan di daerah.
- 2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan.
- 3) Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran evaluasi dan pelaporan.
- 4) Permasalahan akurasi, kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dalam satu sistem terpadu.
- 5) Terbatasnya kajian yang dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada



masyarakat secara tepat dan cepat.

- 7) Belum optimalnya SDM perencana dengan kualitas dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

b. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai berikut:

- 1) Adanya koordinasi yang baik antara *stakeholder* untuk penyediaan data yang dibutuhkan.
- 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan Kab. Kep. Anambas.
- 3) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

2.5 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

Bappeda Kab. Kep. Anambas memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah kepulauan. Namun, dalam pelaksanaannya upaya ini menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur, tantangan geografis sebagai wilayah terluar dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor perencanaan. Kondisi ini menghambat upaya optimalisasi potensi daerah, termasuk sektor perikanan dan pariwisata yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal.



Selain itu, isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam menyusun perencanaan yang efektif. Penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah seringkali menghadapi kendala akibat kurangnya koordinasi dan sinergi lintas sektor. Hal ini berdampak pada implementasi program pembangunan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum efisien. Oleh karena itu, pendekatan inovatif dalam perencanaan, termasuk penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Kab. Kep. Anambas memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis, peran Bappeda Kab. Kep. Anambas menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat merata dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kab. Kep. Anambas bertugas merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD, hingga mengoordinasikan program lintas sektor. Namun, kompleksitas tugas tersebut sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya akses data yang akurat hingga lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga pada hasil pembangunan yang kurang optimal. Hambatan teknis, seperti minimnya penggunaan teknologi informasi



dalam pengelolaan data, mengakibatkan perencanaan tidak berbasis bukti yang kuat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program semakin memperburuk situasi. Hambatan infrastruktur dasar, seperti transportasi dan akses komunikasi yang belum memadai, turut memperlambat implementasi pembangunan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda Kab. Kep. Anambas sangat penting untuk merumuskan strategi penyelesaian yang terukur, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1.	Perencanaan pembangunan belum optimal	Rencana pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Kurangnya data dan informasi yang valid serta terbatasnya sistem pengelolaan data berbasis teknologi
2.	Koordinasi antar-sektor lemah	Tumpang tindih program pembangunan dan inefisiensi alokasi anggaran	Kurangnya sinergi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan
3.	Kapasitas SDM yang terbatas	Kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kurang optimal	Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan berbasis teknologi
4.	Pengawasan dan evaluasi tidak efektif	Penyimpangan dalam pelaksanaan program sulit terdeteksi	Keterbatasan tenaga ahli dan alat ukur untuk monitoring dan evaluasi
5.	Ketergantungan pada dana transfer	Minimnya fleksibilitas dalam menyusun program berbasis potensi lokal	Ketergantungan tinggi pada DAU dan DAK dari pemerintah pusat
6.	Pengembangan sektor maritim kurang	Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan energi kelautan belum dimanfaatkan optimal	Belum adanya prioritas khusus untuk sektor maritim dalam perencanaan pembangunan daerah



7.	Kesenjangan infrastruktur	Wilayah terpencil sulit dijangkau dan layanan publik tidak merata	Terbatasnya infrastruktur transportasi dan komunikasi
----	---------------------------	---	---

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kep. Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi untuk 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.
- 4) Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda terdapat pada Misi Ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif”.



2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementerian/lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas yang memuat sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, dengan indikator :
 - a. Indeks perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan indikator: a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L.
- 3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan indikator: a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L.
- 4) Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan indikator :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan



Nasional;

- c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Selanjutnya, kementerian/lembaga yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator : a. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi; b. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan didaerah dengan kategori utama; Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas, adalah: Faktor penghambat : 1. Rendahnya proesestase keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah; 2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti; 3. Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; Faktor pendorong : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “*money follow function*” menjadi “*money follow program priority*” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan



dan/atau Insentif Inovasi Daerah menjadi alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kab. Kep. Anambas tahun 2023-2043 menjadi pedoman utama dalam penataan ruang yang bertujuan mengintegrasikan fungsi-fungsi perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan sosial. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Strategis

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya maritim, pengembangan pariwisata, dan energi baru terbarukan. Untuk itu, kawasan strategis harus ditetapkan guna mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengelolaan hasil laut, pengembangan destinasi wisata berbasis ekowisata, dan eksplorasi energi surya serta angin. Sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, tata kelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu didasarkan pada pendekatan mitigasi bencana. Hal ini mencakup perlindungan dari abrasi, penguatan infrastruktur pesisir, dan penataan ruang yang mendukung adaptasi terhadap kenaikan muka air laut serta gelombang pasang.

2) Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di Kab. Kep. Anambas. Optimalisasi jaringan transportasi, termasuk pelabuhan, bandara,



dan transportasi laut, akan memperkuat arus logistik dan mobilitas penduduk. Selain itu, kebutuhan mendasar seperti air bersih harus menjadi prioritas, terutama karena keterbatasan *catchment area* di kawasan kepulauan. Pengembangan infrastruktur air baku, seperti waduk dan sistem distribusi air yang efisien, menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

3) Fungsi Lindung dan Budidaya

Penyelarasan fungsi lindung dan budidaya dalam tata ruang wilayah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Kawasan hutan, mangrove, dan lahan gambut yang berperan sebagai penyerap karbon dan pelindung alami dari bencana harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Di sisi lain, pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif seperti perikanan, agrikultur, dan pariwisata harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Penataan ruang yang berbasis keberlanjutan akan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem, melainkan saling mendukung dengan keberlangsungan lingkungan.

4) Sinergi dengan SDGs

RTRW Kab. Kep. Anambas harus mencerminkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Rencana tata ruang harus mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, RTRW akan berperan sebagai panduan strategis untuk menciptakan wilayah



yang lebih inklusif, tangguh terhadap perubahan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- 2) Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- 3) antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- 4) peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul; dan
- 5) aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai perangkat daerah yang



memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kab. Kep. Anambas antara lain :

1) Aspek Lingkungan Hidup

a) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kab. Kep. Anambas menghadapi tantangan serius dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya untuk sektor pertanian dan penyediaan air bersih. Minimnya *catchment* area dan tekanan terhadap sumber daya alam membutuhkan strategi pemanfaatan yang efisien. Upaya konservasi lahan dan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi harus diimplementasikan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas lingkungan.

b) Kerentanan terhadap Bencana

Sebagai daerah kepulauan, Anambas sangat rentan terhadap abrasi, banjir, dan gelombang pasang di wilayah pesisir, sementara kawasan lereng curam berisiko tinggi terhadap longsor. Pengelolaan tata ruang yang terintegrasi dengan mitigasi bencana diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Program seperti reboisasi, penguatan infrastruktur pesisir, dan penataan kawasan rawan bencana menjadi solusi penting untuk meningkatkan



ketahanan wilayah.

c) Keanekaragaman Hayati

Hutan sekunder dan *mangrove* di Kab. Kep. Anambas berfungsi sebagai penyangga alami terhadap perubahan iklim dan habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Pelestarian kawasan ini harus menjadi prioritas utama melalui program rehabilitasi, konservasi ekosistem, dan pengendalian aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Hal ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga mendukung sektor ekonomi seperti ekowisata.

2) Aspek Sosial dan Ekonomi:

a) Ketahanan Ekonomi

Promosi ekonomi biru menjadi dasar pembangunan ekonomi di Anambas, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan sektor perikanan, seperti digitalisasi proses perikanan dan penerapan teknologi akuakultur, serta modernisasi pertanian berbasis teknologi, akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing produk lokal.

b) Ketahanan Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih yang layak dan akses pendidikan berkualitas, merupakan langkah utama untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Program ini perlu diperluas untuk memastikan inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

c) Riset dan Inovasi Daerah

Riset untuk pengembangan energi terbarukan



seperti tenaga angin dan surya sangat penting untuk mendukung diversifikasi energi di Anambas. Selain itu, pemanfaatan big data dalam pengelolaan kawasan dan layanan publik dapat memberikan informasi *real-time* yang mendukung pengambilan keputusan lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih responsif dan berbasis bukti, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam implementasi program pembangunan daerah.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi perencanaan pembangunan;
2. Penguatan koordinasi antar-sektor;
3. Peningkatan kapasitas SDM ;
4. Penguatan pengawasan dan evaluasi;
5. Diversifikasi pendapatan daerah;
6. Pengembangan sektor maritim; dan
7. Penyediaan infrastruktur yang merata.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan indikator tujuan/sasaran jangka menengah Bappeda Kab.Kep. Anambas tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab. Kep. Anambas**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	FORMULASI	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional											
Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Penilaian terhadap komponen Sinergi, Kualitas Perencanaan, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (SE Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2023)	Indeks perencanaan pembangunan	72	75	78	81	84	87	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

		Meningkatnya kualitas program pembangunan	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target/Jumlah Indikator Kinerja Sasaran RPJMD*100	Persentase indikator kinerja sasaran dalam RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah											
Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A	A	A	A	A	AA	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,50	84,50	86,50	88,50	89,50	90,50	
PP No. 38 Tahun 2017											



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah dan inovatif	Mewujudkan kualitas Inovasi daerah		Hasil penilaian BSKDN Kemendagri	Indeks Inovasi Daerah	41.8	42.1	42.3	42.5	42.8	41.8	
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Jumlah Produk Invoasi yang Dimanfaatkan/ Jumlah Produk Inovasi	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	40%	50%	60%	70%	80%	90%		



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Kep. Anambas. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel. 3.2 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat.	Penyelarasan dokumen perencanaan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.	
2	Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang	Menyusun dokumen perencanaan secara konsisten, terpadu,	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Kinerja Instansi Pemerintah	profesional, akuntabel, amanah dan berintegritas.	dan selaras antar dokumen (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPDP, Renja PD).	
	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel			
3	PP No. 38 Tahun 2017	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis inovasi dan pengembangan teknologi.	Penguatan sistem perencanaan berbasis teknologi informasi.	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah dan inovatif			

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kab. Kep. Anambas.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.1. (T-C.27.) di bawah ini .



Tabel. 4.1 (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Bappeda Kab. Kep. Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPJMD	Jumlah program RKPJMD/Jumlah program RPJMD*100%	99%	100%	2.552.452.846,00	100%	1.089.407.996,89	100%	1.137.177.996,73	100%	1.216.717.413,37	100%	1.466.519.949,00	100%	1.391.738.383,83		
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Jumlah program RENSTRA /Jumlah program RPJMD*100%	99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu dan sesuai konten/Jumlah total dokumen perencanaan yang direncanakan*100%	100%	100%	2.242.864.440,00	100	830.372.296,89	100	852.238.726,73	100	913.284.216,37	100	1.151.743.432,00	100	1.012.484.216,83		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	0	1	4.570.000,00	1	5.027.000,00	1	6.429.700,00	1	7.429.700,00	2	8.872.670,00		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	303.022.280,00	1	340.356.000,00	1	342.611.473,00	2	388.390.766,37	1	400.172.620,00	1	413.989.882,00		
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	10	10	-	10	85.874.297,00	10	86.461.727,00	10	93.919.950,00	10	94.007.900,00	10	103.408.690,00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	2	2	1.939.842.160, 00	2	399.571.999,8 9	1	418.138.526,7 3	2	424.543.800,0 0	1	650.133.212,0 0	1	486.212.974,8 3	
<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>																
<i>Tersedianya data dan informasi yang valid, mutakhir, dan terverifikasi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.</i>	<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu/Jumlah total dokumen perencanaan yang direncanakan*100%</i>	80	80	22.698.600,00	80	90.377.100,00	80	99.414.810,00	80	109.356.291,0 0	80	110.291.920,0 0	80	132.321.112,0 0	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	22.698.600,00	1	90.377.100,00	1	99.414.810,00	1	109.356.291,0 0	1	110.291.920,0 0	1	132.321.112,0 0	
<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>																
<i>Terselenggaranya pengendalian, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator sasaran RPJMD secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	76	77	286.889.806,0 0	78	168.658.600,0 0	80	185.524.460,0 0	83	194.076.906,0 0	85	204.484.597,0 0	90	246.933.055,0 0	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4 5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 5	5	286.889.806,0 0	5	168.658.600,0 0	5	185.524.460,0 0	5	194.076.906,0 0	6	204.484.597,0 0	5	246.933.055,0 0	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang PPM dan PSDAIW	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)		100	100	173.847.260,0 0	100	1.202.549.000, 00	100	1.212.159.560, 00	100	1.314.044.290, 00	100	1.444.882.921, 66	100	1.658.964.016, 00	
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IW)		100	100		100		100		100		100		100		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Terlaksananya koordinasi, asistensi, monitoring, serta sinergitas dan harmonisasi perencanaan antar perangkat daerah dalam urusan pemerintahan dan pembangunan manusia</i>	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</i>	<i>Jumlah koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan / koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang direncanakan * 100%</i>	100	100	91.685.000,00	100	463.801.000,00	100	422.181.100,00	100	473.199.210,00	100	514.519.131,00	100	572.571.469,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	22.276.000,00	1	146.132.000,00	1	110.348.000,00	1	121.382.800,00	1	133.521.080,00	1	146.873.612,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	8.748.400,00	1	59.078.000,00	1	59.078.000,00	1	64.985.800,00	1	71.484.380,00	1	78.632.818,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	4.450.000,00	1	36.950.000,00	1	36.950.000,00	1	40.645.000,00	1	44.709.500,00	1	49.180.450,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	14.915.600,00	1	87.408.000,00	1	91.148.800,00	1	105.763.680,00	1	110.340.048,00	1	127.974.053,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	1	25.970.000,00	1	83.508.000,00	1	71.858.800,00	1	79.044.680,00	1	86.949.148,00	1	95.644.063,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	1	15.325.000,00	1	50.725.000,00	1	52.797.500,00	1	61.377.250,00	1	67.514.975,00	1	74.266.473,00	
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)</i>																



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya koordinasi, asistensi, monitoring, serta sinergitas dan harmonisasi perencanaan antar perangkat daerah dalam urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, serta sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA	Jumlah koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan / koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA yang direncanakan * 100%	100	100	32.272.490,00	100	296.549.000,00	100	329.803.900,00	100	362.784.290,00	100	399.062.719,00	100	438.968.990,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	-	1	92.166.000,00	1	88.982.600,00	1	97.880.860,00	1	103.668.946,00	8	118.435.840,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	1	12.695.020,00	1	41.757.000,00	1	35.932.700,00	1	39.525.970,00	1	43.478.567,00	4	47.826.424,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	1	-	1	61.450.000,00	1	57.595.000,00	1	60.354.500,00	1	64.689.950,00	4	76.658.945,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	15.862.270,00	1	42.260.000,00	1	46.486.000,00	1	51.134.600,00	1	56.248.060,00	8	61.872.866,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	1	3.715.200,00	1	12.116.000,00	1	13.327.600,00	1	14.660.360,00	1	16.126.396,00	4	17.739.036,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	1	-	1	46.800.000,00	1	51.480.000,00	1	56.628.000,00	1	62.290.800,00	4	68.519.880,00	
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>																
<i>Terlaksananya koordinasi, asistensi, monitoring, serta sinergitas dan harmonisasi perencanaan antar perangkat daerah dalam urusan Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan</i>	<i>Jumlah koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dilaksanakan / jumlah koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang direncanakan * 100%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>49.889.770,00</i>	<i>100</i>	<i>442.199.000,00</i>	<i>100</i>	<i>460.174.560,00</i>	<i>100</i>	<i>478.060.790,00</i>	<i>100</i>	<i>531.301.071,66</i>	<i>100</i>	<i>647.423.557,00</i>	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	18.687.960,00	1	92.166.000,00	1	95.138.260,00	1	96.520.860,00	1	122.672.946,00	1	134.940.241,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	17.003.810,00	1	41.757.000,00	1	45.932.700,00	1	50.525.970,00	1	55.578.567,00	1	61.136.424,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	4.100.000,00	1	61.450.000,00	1	67.595.000,00	1	69.354.500,00	1	81.789.950,00	1	89.968.945,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	10.098.000,00	1	46.260.000,00	1	50.886.000,00	1	53.974.600,00	1	61.572.060,00	1	67.729.266,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	1	-	1	156.116.000,00	1	151.727.600,00	1	153.900.360,00	1	150.524.598,66	1	228.569.436,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	1	-	1	44.450.000,00	1	48.895.000,00	1	53.784.500,00	1	59.162.950,00	1	65.079.245,00	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibngan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan yang menjadi landasan dalam implementasi pembangunan/jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan *100%	20	30	200.000,00	36	250.000.000,00	45	650.000.000,00	54	500.000.000,00	60	250.000.000,00	70	255.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																
Tersusunnya hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian kebijakan/peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan/jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan *100%	50		100.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASEL NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	1	100.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	
<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>																
Tersusunnya hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan oleh perangkat daerah, masyarakat, atau pelaku usaha.	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan inovasi yang dimanfaatkan.	Jumlah hasil penelitian atau perekayasaan yang dimanfaatkan/Jumlah total hasil penelitian atau perekayasaan yang dihasilkan*100%	1	1	100.000,00											
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100.000,00	1	140.000.000,00									
<i>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	1	1	-	1	155.000.000,00	1								
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>																
Tersusunnya hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang relevan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	Jumlah total hasil litbang yang dihasilkan/Jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan*100%					-		250.000.000,00			-		-		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>pembangunan daerah.</i>																	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	-	0	-	1	250.000.000,0 0	0	-	0	-	0	-		
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>																	
<i>Tersusunnya hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang relevan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.</i>	<i>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang yang dimanfaatkan</i>	<i>Jumlah total hasil litbang yang dihasilkan/Jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan*100%</i>					125.000.000,0 0		250.000.000,0 0		350.000.000,0 0						
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	0		0	125.000.000,0 0	0	-	1	350.000.000,0 0	0	-	0	-		
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	0		0	-	1	250.000.000,0 0	0	-	0	-	0	-		
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH																	
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	Jumlah total Perangkat Daerah/Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi*100%	41,18	45	-	50	645.000.000,0 0	55	245.000.000,0 0	60	370.000.000,0 0	65	394.817.000,0 0	75	405.000.000,0 0		
<i>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</i>																	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Tersusunnya hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi/kebijakan yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, inovasi daerah, atau peningkatan layanan publik.</i>	<i>Persentase hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dimanfaatkan</i>	<i>Jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan/Jumlah total litbang yang dihasilkan*100%</i>			-		400.000.000,00		-		45.000.000,00		64.817.000,00		65.000.000,00	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0			0	-	0	-	1	45.000.000,00	1	64.817.000,00	1	65.000.000,00	
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	0			1	400.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	
<i>Invensi dan Inovasi</i>																
<i>Tersusunnya produk inovasi dan inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</i>	<i>Persentase produk inovasi dan inovasi yang berhasil diimplementasikan</i>	<i>Jumlah inovasi yang diimplementasikan/Jumlah total inovasi yang dikembangkan*100%</i>			-		245.000.000,00		245.000.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	40			0	-	0	-	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	0			1	245.000.000,00	1	245.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	8.255.178.931,60	100	9.464.142.016,11	100	9.659.783.436,27	100	9.756.381.270,63	100	9.853.945.083,34	100	9.952.484.534,17	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	606.645.126,00	100	210.100.000,00	100	214.300.000,00	100	218.170.000,00	100	223.425.000,00	100	226.721.000,00	
		Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan / dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100%														



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan*100% (Form E.68 Permendagri 86/2017-Renstra & Form E.70 Permendagri 86/2017-Renja)	7		580.855.126,00	6	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	66.200.000,00	5	67.250.000,00	5	68.200.500,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD & RKAP SKPD	0	2	0	2	50.000.000,00	2	51.300.000,00	2	52.720.000,00	2	53.200.000,00	2	54.100.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen perencanaan dan laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100% kinerja yang seharusnya tepat waktu*100%	3	3	25.790.000,00	3	55.100.000,00	3	56.500.000,00	3	57.250.000,00	3	58.655.000,00	3	59.320.500,00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	0	1	25.000.000,00	1	26.500.000,00	1	27.000.000,00	1	29.320.000,00	2	30.100.000,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	
Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	0	0	0	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>																
<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%</i>	100	100	6.676.861.422,42	100	7.271.962.537,00	100	7.343.759.362,00	100	7.416.254.156,00	100	7.489.453.898,00	100	7.563.365.637,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	26		6.411.161.542,42	49	6.979.682.537,00	50	7.049.479.362,00	50	7.119.974.156,00	50	7.191.173.898,00	50	7.263.085.637,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium PPTK	1	1	257.280.000,00	1	257.280.000,00	1	257.280.000,00	1	257.280.000,00	1	257.280.000,00	1	257.280.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	2	1	8.419.880,00	1	35.000.000,00	1	37.000.000,00	1	39.000.000,00	1	41.000.000,00	1	43.000.000,00	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>																



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%	100		0	100	300.000.000,0 0	100	425.000.000,0 0	100	420.000.000,0 0	100	450.000.000,0 0	100	480.000.000,0 0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas pegawai yang diadakan	65	0	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang telah ikut pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5	0	0	20	100.000.000,0 0	25	125.000.000,0 0	28	140.000.000,0 0	30	150.000.000,0 0	32	160.000.000,0 0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang tersosialisasi peraturan perundang-undangan	3	0	0	20	50.000.000,00	25	125.000.000,0 0	28	140.000.000,0 0	30	150.000.000,0 0	32	160.000.000,0 0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang ikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	0	0	20	100.000.000,0 0	25	125.000.000,0 0	28	140.000.000,0 0	30	150.000.000,0 0	32	160.000.000,0 0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan sub kegiatan*100%	100		576.951.764,1 8	100	1.240.121.979,11	100	1.197.470.824,27	100	1.233.178.539,63	100	1.266.409.752,34	100	1.241.428.200,17	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASEL NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5	5	11.236.634,00	5	5.073.000,00	5	5.580.300,00	5	6.138.330,00	5	6.752.163,00	5	7.427.379,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	19	19	84.703.581,00	19	85.421.000,00	19,00	86.230.000,00	19	89.320.420,00	19	91.169.535,00	19	92.506.488,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	24	24	20.552.913,00	24	22.170.000,00	24,00	24.387.000,00	24	26.825.700,00	24	29.508.270,00	24	32.459.097,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1216	1216	89.137.000,00	1216	139.168.000,00	1.965	141.289.300,00	1965	148.393.280,00	1965	151.232.608,00	1965	153.755.869,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5	5	62.780.000,00	5	48.000.000,00	5	50.500.000,00	5	52.391.000,00	5	53.930.100,00	5	60.752.311,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	12	12	100.000,00	12	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	
Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	290.441.636,18	1	866.489.979,11	1	815.684.224,27	1	836.309.809,63	1	860.017.076,34	1	820.727.056,17	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	18.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>																
<i>Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100%</i>	100	100	116.900.000,00	100	119.000.000,00	100	140.000.000,00	100	110.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	2	0	0	0	-	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	0	-	0	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	0	0	0	1	49.000.000,00	0		0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	11	116.900.000,00	0	2	20.000.000,00	5	50.000.000,00	2	20.000.000,00	0	-	0	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	2	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																
<i>Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya</i>	<i>Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%</i>	100	100	271.260.619,00	100	210.000.000,00	100	221.000.000,00	100	232.100.000,00	100	243.310.000,00	100	254.641.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	139.149.450,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	1	1	129.611.169,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	FORMULASI	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin/2*100%)	80	80	6.560.000,00	80	112.957.500,00	85	118.253.250,00	90	126.678.575,00	95	131.346.433,00	100	136.328.697,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22	1.560.000,00	22	43.857.500,00	22	48.243.250,00	22	53.067.575,00	22	55.374.333,00	22	58.211.766,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	18		5.000.000,00	29	69.100.000,00	33,00	70.010.000,00	34	73.611.000,00	36	75.972.100,00	38	78.116.931,00	
TOTAL					10.981.679.03 7,60		12.651.099.01 3,00		12.904.120.99 3,00		13.157.142.97 4,00		13.410.164.95 4,00		13.663.186.93 4,00	



Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam koordinasi perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Kep. Anambas mengampu pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui peran ini, Bappeda memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terarah, terpadu, berbasis data, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program priortitas Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.



Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penataan Organisasi, penataan perundang-undangan, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan	
4	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			Invensi dan Inovasi	
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kajian yang bermanfaat dalam pengembangan potensi unggul bidang maritim dan pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel. 4.3 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	40%	50%	60%	70%	80%	90%	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82,50	84,50	86,50	88,50	89,50	90,50	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh Bappeda mencerminkan peran strategis lembaga ini



dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, Bappeda tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan PERDA RPJPD pada tahun 2024
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan PERDA RPJMD pada tahun 2025
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan PERKADA RKPD setiap tahun
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



		program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan								
6	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD / Jumlah kelitbangan dalam RPJMD x100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x100% Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	80%	82%	84%	86%	88%	90%		
8	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / Jumlah total perangkat daerah x100%	16,13	29,03	45,16	58,06	67,74	77,42		
9	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang diusulkan x100%	12,5	29,17	50	75	83,33	100		



BAB V PENUTUP

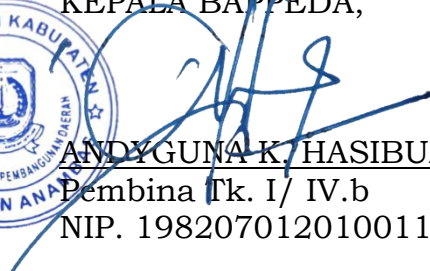
Dengan tersusunnya dokumen Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, langkah awal perencanaan strategis pembangunan daerah telah menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual. Dokumen ini dirancang berdasarkan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang sejalan dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini juga telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dokumen ini siap untuk diharmonisasi pada tahapan berikutnya guna memastikan keselarasan dengan kebijakan lintas sektor, masukan dari pemangku kepentingan, dan kebutuhan daerah secara holistik. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung terwujudnya Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan unggul di bidang maritim menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Tarempa, 22 September 2025

KEPALA BAPPEDA,




ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 198207012010011019